



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR :188.46/ 082 /DISKOMINFOSAN-BLG/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK)
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK);
 - b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

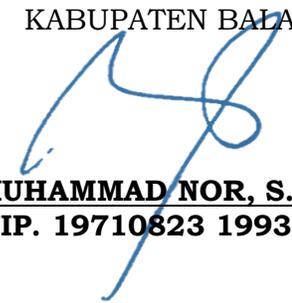
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026
- KESATU : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dan lebih bersifat impact dan/atau minimal outcome
- KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dan bersifat outcome dan/atau output yang berkualitas
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN


MUHAMMAD NOR, S. Sos, MM
NIP. 19710823 199303 1 005

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN
 NOMOR : 188.46/082/DISKOMINFOSAN-BLG/2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS
 KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

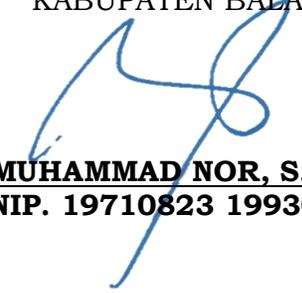
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	a. Keterbukaan Informasi Publik secara baik, benar dan bertanggungjawab, serta menjadi agen perubahan dalam pelayanan informasi publik yang terbuka b. Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik c. Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku / Jumlah seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kab. d. Balangan X 100 % Kep Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/ 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kepala Dins Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2	Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya c. Jumlah Desa Terpencil yang terlayani TIK / Jumlah Desa Terpencil di lingkup Pemerintah Kab. Balangan X 100 % d. Permenpan RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	Kepala Dins Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informasi
		Persentase Perangkat Daerah dengan Layanan e-Government	<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perangkat daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya c. Jumlah SKPD yang menerapkan E-Goverment / Jumlah Seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kab. Balangan X 100 % d. Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	Kepala Dins Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informasi
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data	Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Data Statistik Sektoral menjadi acuan untuk penyusunan perencanaan di SKPD 	Kepala Dins Komunikasi,	Bidang Statistik dan

	Sektoral		<ul style="list-style-type: none"> b. Memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah c. Jumlah OPD yang memanfaatkan data Sektoral dibagi Jumlah Seluruh OPD dikalikan 100% d. Peraturan Bupati Balangan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengelolaan data statistik sektoral daerah 	Informatika, Statistik dan Persandian	Persandian
4	Meningkatnya Keamanan dan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 b. Pengamanan Layanan Aplikasi dan Perlindungan Data Pribadi c. Jumlah kasus serangan cyber yang terpulihkan dibagi jumlah kasus serangan cyber yang masuk dikali 100 % c. BSSN Indeks KAMI Versi 4.1 	Kepala Dins Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Bidang Statistik dan Persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN


MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM
NIP. 19710823 199303 1 005

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN
 NOMOR : 188.46/ 082 /DISKOMINFOSAN-BLG/2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS
 KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

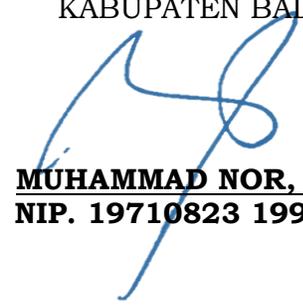
NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) terhadap Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	a. Keterbukaan Informasi Publik secara baik, benar dan bertanggungjawab, serta menjadi agen perubahan dalam pelayanan informasi publik yang terbuka b. Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik c. Kep Menpan No. KEP/25/M.PAN/2/ 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

2.	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarluaskan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbukaan Informasi Publik secara baik, benar dan bertanggungjawab, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang terbuka b. Publikasi di media sosial untuk menyebarluaskan informasi publik c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
3	Meningkatnya Jaringan Koneksi Internet pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot di Kabupaten Balangan	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Balangan 2. Aplikasi Pemerintah Prioritas yang harus Terintegrasi dengan Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan : Aplikasi keuangan, Kepegawaian, Kemiskinan, Monitoring evaluasi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, ekonomi, dan desa 3. Aplikasi Pemerintah yang Terintegrasi dengan Dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan/Jumlah Aplikasi Pemerintah Prioritas terintegrasi dalam dashboard Pemerintah Kabupaten Balangan x 100% 	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informasi	JF Pranata Komputer Ahli Muda
4	Meningkatnya Cakupan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Satuan Kerja Perangkat	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien b. Informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government 	Bidang Pengelolaan Aplikasi Informasi	JF Pranata Komputer Ahli Muda

	Daerah (SKPD)	Komunikasi (TIK)	c. Jumlah SKPD yang menerapkan e-Government dibagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah, di kalikan 100%		
5	Meningkatnya Akses Data Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Terakses	<ul style="list-style-type: none"> a. Data Statistik Sektoral menjadi acuan untuk penyusunan perencanaan di SKPD b. Memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah c. Jumlah data Statistik Sektoral dibagi Jumlah SKPD yang dibina penyusunan data Statistik Sektoral dikalikan 100% 	Bidang Statistik dan Persandian	JF Statistik Ahli Muda
6	Meningkatnya Kualitas Data Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Valid	<ul style="list-style-type: none"> a. Data Statistik Sektoral menjadi acuan untuk penyusunan perencanaan di SKPD b. Data Sektoral yang Valid merupakan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas dan valid yang dimanfaatkan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah c. Jumlah data Statistik Sektoral yang valid dibagi Jumlah SKPD yang dibina penyusunan data Statistik Sektoral dikalikan 100% 	Bidang Statistik dan Persandian	JF Statistik Ahli Muda
7	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Keamanan Informasi	Persentase Gangguan yang terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> a. gangguan Ancaman terhadap keamanan informasi dan dampak yang ditimbulkan berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 b. kesadaran keamanan informasi dalam penyelesaian gangguan terhadap pengamanan layanan aplikasi dan perlindungan data pribadi c. BSSN Indeks KAMI Versi 4.1 	Bidang Statistik dan Persandian	JF Sandiman Ahli Muda
8	Meningkatnya Kualitas Layanan dan	Persentase Keamanan Informasi Satuan Kerja	a. Keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001		

	Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah (SKPD) yang Aman	b. Pengamanan Layanan Aplikasi dan Perlindungan Data Pribadi c. BSSN Indeks KAMI Versi 4.1	Bidang Statistik dan Persandian	JF Sandiman Ahli Muda
--	----------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD NOR, S.Sos, MM
NIP. 19710823 199303 1 005

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 STATISTIK DAN PERSANDIAN
 NOMOR : 188.46/082 /DISKOMINFOSAN-BLG/2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA DINAS
 KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No.	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	a. Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) b. Minimnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di kabupaten Balangan c. Jumlah KIM yang dibentuk dengan adanya regulasi kepala desa	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	KIM Desa
2.	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	a. Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) b. Minimnya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di kabupaten Balangan c. Jumlah KIM yang dibentuk dengan adanya regulasi kepala desa	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan
3.	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	a. Layanan hubungan media b. Keterbukaan layanan hubungan media c. Jumlah Layanan hubungan media	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	KIM Desa

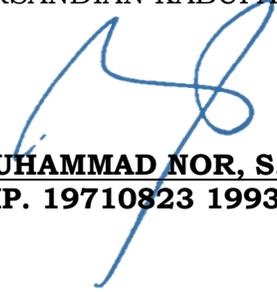
4.	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita Seputar Balangan tersampaikan ke masyarakat b. Keterbukaan informasi publik c. Jumlah artikel yang dipublikasi pada info publik 	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Publikasi di media cetak, radio dan TV
5.	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Artikel berita Pemkab Balangan b. Keterbukaan informasi publik c. Jumlah artikel yang dipublikasi pada info publik 	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Publikasi di media cetak, radio dan TV
6.	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Informasi Publik b. Pemohon layanan PPID c. Jumlah SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID Pembantu dibagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Balangan, dikali 100% 	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan
7.	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan pendapat dan aspirasi publik b. Pendapat dan aspirasi publik sebagai salah satu kompleksitas pilihan-pilihan yang dinyatakan oleh banyak orang berkaitan dengan suatu isu yang dipandang penting oleh umum c. Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik 	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Aspirasi dan Aduan Masyarakat
8.	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah b. Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah c. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Aspirasi dan Aduan Masyarakat
9.	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah b. Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah c. Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Aspirasi dan Aduan Masyarakat
10.	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan sistem yang memadai, terpadu dan terintegrasi 	JF Pranata Komputer Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab

	Pemerintah	Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemerintah daerah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai, terpadu dan terintegrasi c. Jumlah layanan publik secara online dan terintegrasi dibagi jumlah semua layanan publik, dikali 100% 		Balangan
11.	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE b. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik c. PermenPANRB No. 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	JF Pranata Komputer Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan
12.	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi b. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. c. PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 	JF Pranata Komputer Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan
13.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan data meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral b. Data harus up to date, yaitu data yang digunakan harus yang terbaru sehingga dapat dibuat dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral c. Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik 	JF Statistik Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan

			Sektoral		
14.	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	<ul style="list-style-type: none"> a. data statistik sektoral pada setiap urusan pemerintahan b. Tidak adanya data statistik sektoral pada tiap urusan pemerintahan c. Jumlah data statistik sektoral yang dibuat dari beberapa sektor 	JF Statistik Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan
15.	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	<ul style="list-style-type: none"> a. data statistik sektoral pada setiap urusan pemerintahan b. Tidak adanya data statistik sektoral pada tiap urusan pemerintahan c. Jumlah data statistik sektoral yang dibuat dari beberapa sektor 	JF Statistik Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan
16.	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	<ul style="list-style-type: none"> a. Metadata pada sektor tiap urusan pemerintahan b. Tidak adanya Metadata pada tiap-tiap sektor urusan pemerintah c. Jumlah Metadata yang dibuat dari beberapa faktor 	JF Statistik Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan
17.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan data meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral b. Data harus up to date, yaitu data yang digunakan harus yang terbaru sehingga dapat dibuat dokumen koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral c. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 	JF Statistik Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan
18.	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Laporan Serangan/Gangguan Keamanan Informasi yang Terpulihkan dan Terback-Up secara Berkala b. Mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem c. Jumlah informasi yang berhasil diamankan 	JF Sandiman Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan

			dibagi seluruh informasi, dikali 100%		
19.	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Laporan Perangkat Lunak yang Terjamin Keamanannya b. Mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem c. Jumlah informasi yang berhasil diamankan dibagi seluruh informasi, dikali 100% 	JF Sandiman Ahli Muda	SKPD Lingkup Pemkab Balangan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN


MUHAMMAD NOR, S. Sos, MM
NIP. 19710823 199303 1 005